

**LARANGAN HAMIL BAGI CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



OLEH :

DWIGY BRILIAN MUHAMADANIS

NIM : 1311700177

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**LARANGAN HAMIL BAGI CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Disusun Oleh :

DWIGY BRILIAN MUHAMADANIS

NIM. 1311700177

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN SAMPUL

**LARANGAN HAMIL BAGI CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Disusun Oleh :

DWIGY BRILIAN MUHAMADANIS

NIM. 1311700177

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
LARANGAN HAMIL BAGI CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

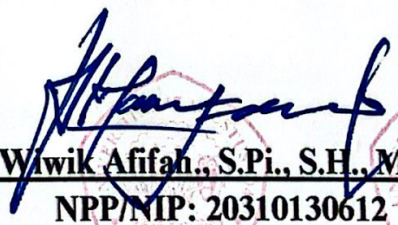
SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DWIGY BRILIAN MUHAMADANIS
NIM : 1311700177

Persetujuan Dosen Pembimbing


Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H
NPP/NIP: 20310130612

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
LARANGAN HAMIL BAGI CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh:
DWIGY BRILIAN MUHAMADANIS
NIM. 1311700177

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal: Jumat, 12 Januari 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1484/ST/FH/XII/2023

TIM PENGUJI:

KETUA : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H
NIP/NPP :196606181991031002
SEKRETARIS : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310130612
ANGGOTA : H.R. Adianto Mardijono S.H., M.Si.
NIP/NPP : 20310930349



Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwigy Brilian Muhamadanis
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul:

“LARANGAN HAMIL BAGI CALON APARTUR SIPIL NEGARA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 15 January 2024

Ya...aan



Dwigy Brilian Muhamadanis

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwigy Brilian Muhamadanis
NIM : 1311700177
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Seminar Call for Paper Vol.1, dengan judul:

“LARANGAN HAMIL BAGI CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSA”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 January 2024
Yang membuat pernyataan



Dwigy Brilian Muhamadanis

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwigy Brilian Muhamadanis
NIM : 1311700177
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Madani Jurnal Ilmiah Multidisiplin, dengan judul:

“Larangan Hamil Bagi Calon Aparatur Sipil Negara Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 January 2024
Yang membuat pernyataan



Dwigy Brilian Muhamadanis

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwigy Brilian Muhamadanis
NBI : 1311700177
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

“LARANGAN HAMIL BAGI CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEREMPUAN DALAM PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 16 Januari 2024



(Dwigy Brilian Muhamadanis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Yang selalu tiada henti mendukung saya untuk mengerjakan penulisan skripsi ini agar selesai. Dan juga kepada saudara saya yang telah banyak membantu saya dari segi materi maupun tenaga. Dan juga untuk teman dan pasangan saya yang selalu support dan mendampingi dalam pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“LARANGAN HAMIL BAGI CALON APARATUR SIPIL NEGARA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”** Skripsi ini adalah salah satu dari beberapa persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Srata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Slamet Suharto, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Wiwik Afifah, S.PI., S.H., M.H. Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum dan selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan bagi penulis.
3. Segenap dosen yang telah memberikan ilmu bagi saya serta staf terkait yang telah melayani administrasi dengan baik.
4. Orangtua, pasangan, serta keluarga, dan teman-teman saya yang telah memberikan energi positif dan bantuan.

Penulis meyakini, segala kebaikan selalu kebersamai mereka dan diberikan rahmat oleh Allah Swt. Penulis sadar, penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata dan terimakasih atas perhatiannya.

ABSTRAK

Setiap masyarakat Indonesia berhak memperoleh pekerjaan yang mereka inginkan. Kalimat masyarakat Indonesia berarti mencakup semua kalangan masyarakat tanpa adanya diskriminasi gender. Setiap manusia berada pada level yang sama dalam persamaan hak yang dimiliki setiap individunya. Pada pelaksanaan seleksi CPNS Kemenhan 2019, pelamar perempuan tidak diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS dalam keadaan hamil. Pernyataan dalam teknis seleksi CPNS tersebut menunjukkan gagasan – gagasan yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (2). Kemenhan sebagai pelaksana seleksi CPNS memberikan tanggapan bahwa larangan tersebut dibuat untuk rangkaian seleksi yang memerlukan tes psikologi hingga kebugaran jasmani. Alasan apapun yang mendasari dibuatnya peraturan tersebut tetap saja masih perlu dikaji supaya tidak terjadi perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dari prespektif HAM (Hak Asasi Manusia). Berbagai bentuk perlindungan hukum untuk hak pekerja perempuan yang sedang mengandung dan pasca melahirkan perlu untuk terus dikembangkan supaya tidak terjadi diskriminasi hak perempuan untuk mendapatkan pekerjaan. Selain perlindungan hukum terkait hak bekerja, hak perempuan untuk mendapatkan upah yang sesuai juga harus diperjuangkan untuk perkembangan negara demokrasi yang adil dan selalu menjunjung Hak Asasi Manusia sebagai dasar untuk mengembangkan peraturan perundang – undangan dan mengurangi diskriminasi terhadap perempuan yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui larangan hamil bagi Calon Aparatur Sipil Negara yang merupakan pelanggaran atau bukan dalam Hak Asasi Manusia dan untuk mengetahui dan menganalisa apakah aturan perlindungan hukum bagi calon Aparatur Sipil Negara Perempuan yang sedang hamil sudah dilakukan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, peneliti hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu pada penelitian tersebut dan mencari pemecahan masalah yang ada.

Kata Kunci : Calon ASN, Hamil, dan Perempuan

ABSTRACT

Every Indonesian has the right to get the job they want. The term Indonesian society means that it includes all levels of society without any gender discrimination. Every human being is at the same level in terms of the equal rights that each individual has. During the 2019 Ministry of Defense CPNS selection, female applicants were not allowed to take part in the CPNS selection while pregnant. The statement in the CPNS selection technique shows ideas that are contrary to the 1945 Constitution Article 28D paragraph (2). The Ministry of Defense, as the implementer of the CPNS selection, responded that the prohibition was made for the selection series which required psychological tests to physical fitness. Whatever the reasons underlying this regulation, it still needs to be studied so that there is no discriminatory treatment of women from a human rights perspective. Various forms of legal protection for the rights of pregnant and post-natal women workers need to continue to be developed so that there is no discrimination in women's rights to get work. Apart from legal protection regarding the right to work, women's right to receive appropriate wages must also be fought for for the development of a democratic country that is fair and always upholds human rights as a basis for developing laws and regulations and reducing discrimination against women in Indonesia. The aim of this research is to find out whether the prohibition on pregnancy for prospective State Civil Servants is a violation of Human Rights or not and to find out and analyze whether the legal protection rules for female Civil Servant Candidates who are pregnant have been implemented. This research uses normative legal research, normative legal research is legal research to find legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer issues in the research and find solutions to existing problems.

Keywords: ASN Candidates, Pregnant, and Women

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	10
1.3 TUJUAN PENELITIAN	10
1.4 MANFAAT PENELITIAN	11
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 METODE PENDEKATAN	11
1.5.1 Jenis Penelitian	11
1.5.2 Metode Pendekatan	11
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	13
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematis	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Hak asasi manusia	15

2.2	Hak Atas Pekerjaan.....	16
2.3	Pelanggaran HAM.....	20
2.4	Kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN).....	22
2.5	Aparatur Sipil Negara	23
2.6	Perempuan	23
2.7	Diskriminasi	24
2.8	Perlindungan Hukum	25
2.9	Wanita Hamil	26
BAB III		29
PEMBAHASAN.....		29
3.1	Larangan Hamil Bagi Calon Aparatur Sipil Negara Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	29
3.1.1	Hak Atas Pekerjaan di Indonesia	29
3.1.2	Persamaan Hak Atas Pekerjaan bagi Perempuan dan Laki-Laki	38
3.1.3	Larangan Hamil Bagi Calon Aparatur Sipil Negara Perempuan Melanggar Hak Asasi Manusia	45
3.2	Perlindungan Hukum bagi Calon Aparatur Sipil Negara Perempuan yang Sedang Hamil.....	53
3.2.1	Proses Tes Calon Aparatur Sipil Negara.....	53
3.2.2	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan	58
3.2.3	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Hamil Dalam Tes Calon Aparatur Sipil Negara	64
BAB IV.....		72
PENUTUP		73
4.1	Kesimpulan.....	73
4.2	Saran	74
DAFTAR BACAAN.....		75